



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BAB I

KONSEPTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
8. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana yang selanjutnya disebut Kepala Bagian Hukum dan Ortala adalah Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Palembang.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang.
10. Inspektur adalah Inspektur Kota Palembang.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing di lingkungan Pemerintah Kota dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2013 - 2018.

Pasal 4

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota menyusun Indikator Kinerja Utama untuk SKPD-nya masing-masing, yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kota dan ditetapkan oleh pimpinan SKPD dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 5

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota menetapkan target kinerja setiap tahunnya dalam dokumen perencanaan.

Pasal 6

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota setiap akhir tahun wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk disampaikan kepada Walikota Palembang c.q. Kepala Bagian Hukum dan Ortala dengan tembusan Kepala Bappeda dan Inspektur.

Pasal 7

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, Inspektur diberikan tugas untuk:

- a. melakukan peninjauan kembali atas capaian kinerja setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Palembang.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2014

Pt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29-12-2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 67

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 67 TAHUN 2014
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1 Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	1 Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	Formulasi Pengukuran: Realisasi PAD tahun sekarang dibandingkan dengan Potensi PAD tahun sekarang (dalam RPJMD) x 100 %. Penanggung jawab data: Dinas Pendapatan Daerah.
	2 Rasio PAD terhadap realisasi pendapatan	Formulasi Pengukuran: Realisasi PAD tahun sekarang dibandingkan dengan Total realisasi pendapatan (Pajak Daerah) x 100 %. Penanggung jawab data : Dinas Pendapatan Daerah. Total Realisasi Pendapatan (Pajak Daerah) dibandingkan dengan Realisasi PAD Tahun Sekarang x 100%. Penanggung jawab data : Dinas Pendapatan Daerah
2 Pemerintahan yang efektif, bersih dan bebas KKN	3 Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Formulasi Pengukuran : Berdasarkan hasil survey Transparency International - Indonesia IPK merupakan rata-rata dari total pengukuran variabel, ditampilkan dengan bentuk skor. Rentang indeks adalah 0-10 dengan 0 dipersepsikan sangat korup dan 10 dipersepsikan sangat bersih. Penanggung Jawab Data : Inspektorat (Publikasi Transparency International - Indonesia).
	4 Skor evaluasi SAKIP Kota Palembang	Formulasi Pengukuran: berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. (Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D). Penanggung Jawab Data: Inspektorat (Publikasi Kemen-PAN RI).

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Keterangan
3	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah	5	Pertumbuhan PDRB	Formulasi Pengukuran : Perbandingan antara (PDRB tahun x - PDRB tahun sebelumnya) dengan PDRB pada tahun x dikalikan 100% Penanggung Jawab data : Dinas Pendapatan Daerah
		6	Indeks Ketimpangan Pendapatan	Formulasi Pengukuran: Indeks Ketimpangan Pendapatan diukur dengan Gini Rasio atau dikenal dengan Gini Coefficient = $1 - \frac{\sum(\alpha X_i - \alpha X_i - 1)(\sigma Y_i - 1 + \sigma Y_i)}{\sigma Y_i}$. Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: □ $G < 0,3$ → ketimpangan rendah □ $0,3 \leq G \leq 0,5$ → ketimpangan sedang □ $G > 0,5$ → ketimpangan tinggi. Penanggung Jawab Data: Bappeda
4	Meningkatnya nilai investasi	7	Jumlah investor berakala nasional (PMDN/PMA)	Formulasi pengukuran: Jumlah investor berakala nasional (PMDN/PMA) yang masuk di Kota Palembang. Penanggung Jawab Data: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
		8	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN / PMA) yang masuk di Kota Palembang. Penanggung Jawab Data: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
5	Meningkatnya kegiatan perdagangan masyarakat	9	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Formulasi Pengukuran: (Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi dengan jumlah total PDRB) dikali 100 %. Penanggung Jawab Data: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
6	Penurunan angka pengangguran	10	Angka pengangguran	Formulasi Pengukuran : Perbandingan antara Jumlah Pengangguran dengan jumlah angkatan kerja x 100%. Penanggung Jawab Data : Dinas Tenaga Kerja
		11	Angka partisipasi angkatan kerja (Per 1.000)	Formulasi Pengukuran : Perbandingan angkatan kerja 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas x 100. Penanggung Jawab Data : Dinas Tenaga Kerja
7	Berkembangnya koperasi, usaha kecil, dan menengah	12	Persentase koperasi aktif	Formulasi Pengukuran: (Perbandingan antara jumlah koperasi aktif dengan jumlah seluruh koperasi) x 100 % . Penanggung Jawab Data: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
		13	Persentase usaha mikro dan kecil aktif	Formulasi Pengukuran: (Perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh UKM) x 100 % . Penanggung Jawab Data: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
		14	Rasio UMK yang menjadi usaha menengah	Formulasi Pengukuran: (Perbandingan antara jumlah UMK yang menjadi usaha menengah dengan jumlah seluruh UKM) x 100 % . Penanggung Jawab Data: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
13 Tersedianya angkutan publik yang layak dan terjangkau	24 Persentase cakupan pelayanan angkutan umum terhadap jaringan jalan yang tersedia	Formulasi Pengukuran: (perbandingan jumlah jaringan jalan kota terlayani angkutan umum dengan jumlah total jaringan jalan kota) x 100 %. Penanggung Jawab Data: Dinas Perhubungan
14 Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat	25 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Formulasi pengukuran : (perbandingan antarajumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas) x 100%. Penanggung Jawab Data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
	26 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Formulasi pengukuran : (perbandingan jumlah siswa usia 7-12 tahun jenjang SD/MI/paket A dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun) x 100%. Penanggung Jawab Data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
	27 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Formulasi pengukuran : (perbandingan jumlah siswa usia 13-15 tahun jenjang SMP/MTs/Paket B dengan jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun) x 100%. Penanggung Jawab Data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
	28 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Formulasi pengukuran : (perbandingan jumlah siswa usia 16 - 18 tahun jenjang SMA/SMK/MA/Paket C dengan jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun) x 100%. Penanggung Jawab Data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
	29 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Formulasi Pengukuran : Perbandingan antara jumlah capaian kinerja APS SD/MI se Kota dengan jumlah seluruh APS SD/MI se kota x 100%. Penanggung Jawab Data : Dinas pendidikan pemuda dan olahraga
	30 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Formulasi Pengukuran : Perbandingan antara jumlah capaian kinerja APS SMP/MTS se Kota dengan jumlah APS SMP/MTS se kota x 100%. Penanggung Jawab Data : Dinas pendidikan pemuda dan olahraga
	31 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Formulasi Pengukuran : Perbandingan antara jumlah capaian kinerja APS SMA/SMK/MA se Kota dengan jumlah seluruh APS SMA/SMK/MA se kota x 100%. Penanggung Jawab Data : Dinas pendidikan pemuda dan olahraga
	32 Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Formulasi Pengukuran : Perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dengan Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SD/MI pada Tahun Sebelumnya x 100%. Penanggung Jawab Data : Dinas pendidikan pemuda dan olahraga

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
8 Meningkatkan ketahanan pangan	15 Ketersediaan energi dan protein perkapita*	Formulasi pengukuran: Ketersediaan energi: Perbandingan antara ketersediaan pangan / kapita/hari dibagi 100 x kandungan kalori x BDD Penanggung Jawab Data: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	16 Penguatan cadangan pangan*	Formulasi pengukuran: Ketersediaan protein: Perbandingan antara ketersediaan pangan / kapita/hari dibagi 100 x kandungan kalori x BDD Penanggung Jawab Data: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tersedianya cadangan Pemerintah di Tingkat Kota minimal sebesar 100 Ton ekuivalen beras.
	17 Pencapaian skor pola pangan harapan (PHH)*	Formulasi Pengukuran: Pengukuran antara energi masing-masing komoditas dengan angka kecukupan gizi x 100% Penanggung Jawab Data: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
9 Meningkatnya hasil produksi perikanan	18 Produksi perikanan	Formulasi Pengukuran: Perbandingan Jumlah Produksi Ikan (ton) dengan target daerah x 100%. Penanggung Jawab Data: Dinas Pertanian, perikanan dan kehutanan
10 Meningkatnya kepatuhan terhadap perda tata ruang kota yang telah ditetapkan (RTRW, RDTR)	19 % kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Formulasi Pengukuran: (Perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Palembang dengan luas total wilayah wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dan RDTRK Kota Palembang) x 100%. Tipe penghitungan: kumulatif. Penanggung Jawab Data: Dinas Tata Kota
11 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup permukiman	20 Persentase cakupan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Formulasi Pengukuran: (perbandingan antara Jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi dengan total jumlah rumah tangga) x 100%. Penanggung Jawab Data: Dinas PU Cipta Karya Perumahan
	21 Persentase cakupan pengelolaan sampah	Formulasi Pengukuran: (perbandingan antara jumlah sampah domestik yang dikelola dengan jumlah timbulan sampah) x 100%. Penanggung Jawab Data: Dinas Kebersihan
	22 Pengurangan titik/luas genangan	Formulasi Pengukuran: (Perbandingan antara luasan daerah yang sebelumnya tergenang dan kemudian terbebas dari genangan, dengan luasan daerah yang rawan genangan dan berpotensi tergenang) x 100%. Penanggung Jawab Data: Dinas PU Bina Marga-PSDA
12 Meningkatnya aksesibilitas lalu lintas masyarakat	23 Jarak dan waktu tempuh per kilometer	Formulasi Pengukuran: Perbandingan Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan. Penanggung Jawab Data: Dinas Perhubungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
	33 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Formulasi Pengukuran : Perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS dengan Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMP/MTS pada Tahun Sebelumnya x 100%. Penanggung Jawab Data : Dinas pendidikan pemuda dan olahraga
	34 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Formulasi Pengukuran : Perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA dengan Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMA/SMK/MA pada Tahun Sebelumnya x 100%. Penanggung Jawab Data : Dinas pendidikan pemuda dan olahraga
	35 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Formulasi Pengukuran : Perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTS dengan Jumlah lulusan pada Jenjang SD/MI pada Tahun ajaran Sebelumnya x 100%. Penanggung Jawab Data : Dinas pendidikan pemuda dan olahraga
	36 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Formulasi Pengukuran : Perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dengan Jumlah lulusan pada Jenjang SMP/MTS pada Tahun ajaran Sebelumnya x 100%. Penanggung Jawab Data : Dinas pendidikan pemuda dan olahraga
	37 Rata-rata lama sekolah	Formulasi Pengukuran : (Perbandingan jumlah tahun bersekolah individu usia 5 Tahun keatas dengan jumlah ibu melahirkan selamat per tahun)x 100%. Penanggung Jawab Data : Dinas pendidikan pemuda dan olahraga.
15 Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat	38 Angka usia harapan hidup	Formulasi pengukuran: Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Penanggung Jawab Data: Dinas Kesehatan.
	39 Angka/jumlah balita dgn gizi buruk (prevalensi gizi buruk)	Formulasi Pengukuran : (Jumlah kasus balita gizi buruk pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah total balita pada tahun tertentu) x 100 . Penanggung Jawab Data : Dinas Kesehatan
	40 Angka/jumlah kematian bayi	Formulasi Pengukuran : (Jumlah kematian bayi pada satu tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu) x 1000. Penanggung Jawab Data : Dinas Kesehatan
	41 Angka/jumlah kematian ibu	Formulasi Pengukuran : (Jumlah kematian ibu saat hamil, melahirkan dan nifas pada satu tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu)x 100.000 Penanggung Jawab Data : Dinas Kesehatan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Keterangan
16	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	42	Rata-rata lama kunjungan wisatawan Formulasi pengukuran : Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik dan mancanegara di Kota Palembang. Penanggung Jawab Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		43	Jumlah wisatawan Formulasi pengukuran : Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara di Kota Palembang. Penanggung Jawab Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO